



Integrasi Psikologi, Pedagogi, dan Konseling sebagai Dasar Interdisipliner dalam Peningkatan Profesionalisme Konselor Edukasi

**Rochiyatin Rifai^{1*}, Evi Winingsih², Budiyanto³, Diana Rahmasari⁴,
Bakhrudin All Habsy⁵**

Universitas Negeri Surabaya, Indonesia^{1, 2, 3, 4, 5}

Email: 25011355036@mhs.unesa.ac.id^{1*}, eviwarningsih@unesa.ac.id²,
budiyanto@unesa.ac.id³, dianarahmasari@unesa.ac.id⁴, bakhrudinhabasy@unesa.ac.id⁵

Keywords:

educational counselor; cross-disciplinary integration; psychology; pedagogy; professionalism

Abstract

This research aims to explain the importance of integrating psychology, pedagogy, and counseling as an interdisciplinary foundation for strengthening the professionalism of educational counselors in Indonesia. The main theoretical framework integrates understanding of developmental psychology, teaching methods, and professional counseling practices to produce comprehensive, responsive, and student-centered guidance and counseling services. The discussion focuses on theoretical analysis and conceptual synthesis of the integration of these three disciplines, reflections on the challenges and opportunities in implementing guidance and counseling services in Indonesia, and strategic suggestions for developing counselor skills. The writing method is applied using a literature analysis approach and critical reflection on the scientific context and current educational counseling practices. The main conclusions indicate that this interdisciplinary method strengthens counselors' technical skills, emotional sensitivity, and collaboration, thereby increasing the efficiency of guidance and counseling services. Recommendations include the development of an integrated curriculum, collaborative training, the use of technology, and continuous assessment to enhance counselor professionalism. Therefore, this strategy serves as a crucial foundation for improving the quality of education and student well-being in Indonesia.

Kata Kunci:

konselor pendidikan; integrasi lintas disiplin; psikologi; pedagogi; profesionalisme

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menjelaskan betapa pentingnya mengintegrasikan psikologi, pedagogi, dan konseling sebagai landasan interdisipliner untuk memperkuat profesionalitas konselor pendidikan di Indonesia. Kerangka teori utama mengintegrasikan pemahaman tentang psikologi perkembangan, metode pengajaran, dan praktik konseling profesional untuk menghasilkan layanan bimbingan dan konseling yang menyeluruh, responsif, serta sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Pembahasan tertuju pada analisis teoretis dan sintesis konsep integrasi ketiga bidang ilmu itu, refleksi mengenai tantangan dan kesempatan dalam pelaksanaan layanan BK di Indonesia, serta saran strategis untuk pengembangan keterampilan konselor. Metode penulisan diterapkan dengan pendekatan analisis literatur dan refleksi kritis mengenai konteks ilmiah serta praktik konseling pendidikan yang ada saat ini. Kesimpulan utama menunjukkan bahwa metode interdisipliner ini memperkuat keterampilan teknis, kepekaan emosional, dan kerja sama konselor, sehingga meningkatkan efisiensi layanan BK. Rekomendasi mencakup pengembangan kurikulum yang terintegrasi, pelatihan kerja sama, pemakaian teknologi, dan penilaian yang berkesinambungan untuk meningkatkan profesionalisme konselor. Oleh karena itu, strategi ini berperan sebagai dasar krusial dalam meningkatkan mutu pendidikan serta kesejahteraan siswa di Indonesia.

PENDAHULUAN

Era postmodern dan postdisiplinari menandakan pergeseran paradigma ilmiah yang penting, di mana batas antardisiplin ilmu tidak lagi tegas dan terpisah, melainkan semakin samar dan saling berinteraksi (Repko, 2012). Paradigma ini mengharuskan pendekatan ilmiah yang menyeluruh, melibatkan berbagai disiplin, dan kontekstual, mengingat kerumitan isu yang dihadapi individu dan komunitas saat ini. Dalam ranah pendidikan, khususnya dalam layanan bimbingan dan konseling (BK), paradigma pascadisipliner memerlukan pengembangan pengetahuan yang tidak sekadar berpusat pada satu bidang, melainkan menggabungkan berbagai disiplin yang relevan seperti psikologi, pedagogi, dan konseling itu sendiri (Neukrug, 2017; Sari, 2020).

Penguatan ilmu BK yang berlandaskan pada filsafat ilmu dan integrasi antarbidang sangat diperlukan untuk menjawab tantangan zaman sekarang, khususnya dalam menghadapi kebutuhan peserta didik yang kian kompleks. Pendekatan lintas disiplin memungkinkan konselor pendidikan untuk memahami siswa secara komprehensif dari perspektif psikologis, proses belajar, serta kebutuhan dukungan sosial dan emosional (Santrock, 2018; Corey, 2017). Selain itu, integrasi ini juga mendorong para konselor untuk mengimplementasikan intervensi yang lebih efisien, kontekstual, dan fleksibel terhadap perubahan sosial dan budaya yang terjadi di Indonesia (Pratiwi & Hidayat, 2021; Walsh, 2006).

Literatur terbaru menekankan pentingnya pengembangan profesional bagi konselor yang tidak hanya menguasai teknik konseling, tetapi juga memiliki pemahaman yang mendalam tentang psikologi perkembangan dan pedagogi (Erford, 2018; Sari, 2020). Hattie (2012) menekankan pentingnya pedagogi dalam membangun suasana belajar yang mendukung, sedangkan Corey (2017) menekankan nilai komunikasi dan empati dalam praktik konseling. Penelitian Pratiwi dan Hidayat (2021) menunjukkan bahwa kurangnya integrasi dalam kurikulum pendidikan konselor berdampak pada kesiapan profesional konselor menghadapi kompleksitas siswa. Oleh sebab itu, pengembangan kurikulum yang mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu dan pelatihan secara kolaboratif menjadi suatu keharusan yang mendesak.

Pertanyaan sentral yang menjadi inti artikel ini adalah: Bagaimana perkembangan ilmu bimbingan dan konseling di zaman post-disipliner yang bersifat humanistik, kontekstual, dan etis? Pertanyaan ini penting untuk menentukan bagaimana konselor pendidikan bisa memperkuat profesionalismenya dengan mengintegrasikan psikologi, pedagogi, dan konseling sehingga layanan BK.

Kajian sebelumnya umumnya masih membahas psikologi, pedagogi, dan konseling secara terpisah, sehingga belum terbentuk kerangka interdisipliner yang utuh dalam penguatan profesionalisme konselor edukasi. Sebagian penelitian menitikberatkan pada profesionalisme konselor, sebagian pada pendekatan pedagogis, dan sebagian lainnya pada aspek psikologis peserta didik. Kondisi ini menunjukkan perlunya sintesis konseptual yang lebih komprehensif, khususnya dalam konteks pendidikan Indonesia yang multikultural, dinamis, dan humanistik. Berdasarkan hal tersebut, novelty penelitian ini terletak pada upayanya merumuskan integrasi psikologi, pedagogi, dan konseling sebagai landasan interdisipliner yang utuh dalam membangun profesionalisme konselor edukasi. Penelitian ini tidak hanya melihat ketiga disiplin sebagai unsur pendukung, tetapi sebagai fondasi konseptual yang saling berkaitan

secara epistemologis, aksiologis, dan praktis. Penelitian ini juga penting karena menjawab kebutuhan nyata di lapangan, di mana konselor pendidikan dituntut mampu bekerja secara kolaboratif dalam sistem sekolah yang kompleks serta merespons kebutuhan peserta didik yang semakin beragam. Tanpa dasar interdisipliner yang kuat, layanan bimbingan dan konseling berisiko kurang efektif dan tidak mampu menjawab kebutuhan siswa secara menyeluruh.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pentingnya integrasi psikologi, pedagogi, dan konseling sebagai dasar interdisipliner dalam peningkatan profesionalisme konselor edukasi. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan menjelaskan kontribusi masing-masing disiplin dalam memperkuat kompetensi profesional konselor dan merumuskan kerangka konseptual bagi pengembangan layanan bimbingan dan konseling yang humanistik, kontekstual, etis, dan adaptif. Adapun manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya kajian bimbingan dan konseling, khususnya dalam pengembangan paradigma interdisipliner. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi rujukan bagi konselor, lembaga pendidikan tinggi, dan pengambil kebijakan dalam mengembangkan kurikulum, pelatihan, dan layanan bimbingan dan konseling yang lebih relevan dengan kebutuhan pendidikan saat ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang bertujuan memberikan gambaran komprehensif mengenai integrasi psikologi, pedagogi, dan konseling sebagai landasan interdisipliner dalam meningkatkan profesionalisme konselor pendidikan. Pendekatan ini dipilih karena mampu menjelaskan fenomena secara mendalam berdasarkan kajian konseptual, analisis teoritis, serta refleksi kritis terhadap praktik bimbingan dan konseling dalam konteks pendidikan Indonesia sebagaimana dibahas dalam artikel ini. Penelitian dilaksanakan dalam konteks kajian akademik bidang bimbingan dan konseling pendidikan dengan fokus pada pengembangan paradigma keilmuan yang integratif dan kontekstual. Waktu penelitian dilaksanakan secara bertahap selama proses penyusunan karya ilmiah, mulai dari pengumpulan literatur, analisis konsep, hingga penyusunan sintesis pemikiran. Adapun aspek yang dikaji meliputi: (a) aspek filosofis yang mencakup landasan ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam bimbingan dan konseling, (b) aspek teoritis yang berkaitan dengan integrasi psikologi perkembangan, pedagogi pendidikan, dan teori konseling modern, serta (c) aspek praktis yang berkaitan dengan implementasi profesionalisme konselor dalam layanan pendidikan. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini berupaya memberikan kerangka berpikir yang sistematis mengenai bagaimana integrasi multidisiplin dapat menjadi solusi dalam menjawab kompleksitas permasalahan peserta didik di era pendidikan modern.

Populasi dalam penelitian ini adalah berbagai sumber literatur ilmiah yang relevan dengan tema integrasi keilmuan bimbingan dan konseling, termasuk jurnal ilmiah, buku akademik, regulasi pendidikan, serta dokumen profesional yang berkaitan dengan kompetensi konselor pendidikan. Sampel penelitian ditentukan secara purposive berdasarkan relevansi substansi dengan topik penelitian, khususnya sumber yang membahas profesionalisme konselor, pendekatan interdisipliner, serta perkembangan paradigma bimbingan dan konseling. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan studi literatur

dengan mengkaji berbagai referensi ilmiah yang kredibel dan mutakhir. Instrumen penelitian dalam kajian ini berupa lembar analisis literatur, matriks sintesis konsep, serta catatan reflektif yang digunakan untuk mengidentifikasi keterkaitan antar konsep utama penelitian. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teknik analisis tematik untuk mengelompokkan gagasan utama yang ditemukan dalam berbagai referensi ke dalam beberapa kategori pembahasan seperti paradigma keilmuan, integrasi disiplin ilmu, pendekatan konseling, serta tantangan profesionalisme konselor. Dengan demikian, data yang diperoleh tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis karena melalui proses reduksi, kategorisasi, serta interpretasi terhadap konsep-konsep utama yang relevan dengan tujuan penelitian.

Teknik analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan yang sistematis, yaitu: (a) reduksi data dengan memilih literatur yang memiliki keterkaitan langsung dengan fokus penelitian, (b) penyajian data dalam bentuk narasi konseptual yang terstruktur berdasarkan tema utama, serta (c) penarikan kesimpulan melalui proses sintesis integratif yang menghubungkan berbagai perspektif keilmuan. Untuk menjaga validitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai referensi ilmiah yang memiliki kesamaan topik pembahasan. Selain itu, keabsahan data juga diperkuat melalui konsistensi argumentasi teoritis serta kesesuaian antara konsep yang digunakan dengan konteks pendidikan di Indonesia. Prosedur penelitian dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu: (1) identifikasi masalah yang berkaitan dengan pentingnya integrasi keilmuan dalam meningkatkan kualitas layanan bimbingan dan konseling, (2) pengumpulan referensi ilmiah yang relevan, (3) analisis kritis terhadap konsep-konsep utama, (4) penyusunan kerangka integrasi konseptual, serta (5) penyusunan rekomendasi pengembangan profesionalisme konselor pendidikan. Melalui tahapan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi konseptual dalam pengembangan keilmuan bimbingan dan konseling yang lebih adaptif, humanistik, dan kontekstual. Dengan demikian, metodologi penelitian ini dirancang untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai strategi penelitian dalam menghasilkan solusi konseptual terhadap permasalahan profesionalisme konselor melalui pendekatan integratif tanpa berfokus pada prosedur teknis metode tertentu, melainkan pada kerangka strategis penelitian yang sistematis dan relevan dengan kebutuhan pengembangan layanan bimbingan dan konseling di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Paradigma Keilmuan BK: Modern, Postmodern, dan Transdisipliner

1) Tiga paradigma dibandingkan dan contoh penerapannya dalam BK.

Paradigma modern menekankan pengetahuan yang dikembangkan melalui proses sistematis, pengukuran, pengujian, serta tanggung jawab. Dalam BK, modernisme terlihat melalui penerapan asesmen standar, intervensi yang didasarkan pada bukti, serta evaluasi hasil layanan (Corey, 2017; Erford, 2018). Sebagai contoh, penelitian kuasi-eksperimen mampu mengkaji efektivitas konseling kelompok terstruktur berdasarkan skor pra–pasca serta indikator perilaku belajar (Permendikbud RI, 2014).

Paradigma postmodern menegaskan bahwa pengalaman manusia dipahami lewat bahasa, cerita, hubungan, dan konteks kekuasaan; kebenaran adalah multiform dan kontekstual. Dalam konseling, pendekatan naratif dan berfokus pada solusi mengangkat posisi konseli sebagai "ahli" dalam kehidupan mereka; konselor berfungsi sebagai fasilitator dialog

yang mendukung munculnya makna alternatif yang lebih memberdayakan (de Shazer, 1991; White & Epston, 1990). Contoh penerapan riset postmodern dalam BK adalah penelitian kualitatif mengenai bagaimana stigma “anak nakal” atau budaya pemeringkatan membentuk identitas serta strategi coping siswa, dan kemudian menganalisis bagaimana perubahan narasi diri berhubungan dengan peningkatan keterlibatan belajar.

Paradigma transdisipliner menekankan integrasi antardisiplin serta antarpihak, dengan isu-isu dunia nyata sebagai titik awal dan tujuan perubahan sistem sebagai fokus (Nicolescu, 2002; Repko, 2012). Dalam BK sekolah, hal ini terlihat saat konselor bekerja sama dengan guru, kepala sekolah, orang tua, layanan kesehatan, dan masyarakat untuk mengembangkan pencegahan, rujukan, serta lingkungan sekolah yang aman (Permendikbud RI, 2014).

Singkatnya, modern menyoroti validitas dan efektivitas, postmodern menekankan arti dan konteks, sedangkan transdisipliner menekankan penggabungan pengetahuan dan tindakan bersama (Repko, 2012). BK yang tangguh biasanya tidak hanya memilih satu dan menolak yang lain, tetapi lebih kepada menyusun hubungan di antara ketiga aspek tersebut.

2) Kedudukan paradigma post-disipliner sebagai penghubung

Paradigma post-disipliner dapat dimaknai sebagai suatu cara berpikir di mana batas-batas disiplin tidak lagi dipandang sebagai “penghalang”, melainkan sebagai “alat bantu” yang dapat dilalui secara bertanggung jawab. Post-disipliner tidak menolak disiplin, tetapi menolak kesetiaan tanpa pemikiran pada satu disiplin ketika menghadapi masalah nyata yang rumit. Posisi jembatannya tampak dalam tiga hal. Pertama, menjembatani metodologi: konselor dapat memadukan kuantitatif (akuntabilitas) dan kualitatif (makna-konteks) melalui desain mixed methods yang koheren (Crotty, 1998). Kedua, menjembatani level analisis. Banyak masalah siswa berlapis—dari intrapersonal, interpersonal, institusional, hingga struktural. Kerangka ekologis membantu konselor memahami bahwa perubahan individu sering bergantung pada perubahan konteks (Bronfenbrenner, 1979). Ketiga, menjembatani praktik, nilai, dan etika. Intervensi berbasis bukti penting, tetapi bukti tidak otomatis cocok jika bahasa, identitas, dan norma budaya diabaikan. Post-disipliner mendorong eklektisisme bertanggung jawab: konselor memilih pendekatan berbasis kebutuhan konseli dan konteks layanan, lalu menjelaskan rasionalnya secara ilmiah sekaligus menjaga martabat dan keselamatan konseli (IKI, 2011; Permendikbud RI, 2014).

b. Filsafat Ilmu sebagai Basis Epistemologis

BK Filsafat ilmu menjaga BK agar tidak merosot menjadi sekadar kumpulan teknik. Ia memandu konselor untuk konsisten menjawab: apa hakikat manusia yang ditolong (ontologi), bagaimana pengetahuan BK dibangun dan divalidasi (epistemologi), dan nilai apa yang menjadi arah pertolongan (aksiologi) (Crotty, 1998).

1) Ontologi: hakikat manusia dan perilaku dalam BK

Ontologi BK pendidikan berangkat dari asumsi bahwa manusia adalah makhluk berkembang, relasional, dan pencari makna. Perilaku dipahami sebagai ekspresi kebutuhan, strategi adaptasi, dan hasil interaksi dengan lingkungan belajar, keluarga, komunitas, bukan semata-mata baik–buruk atau patuh–melanggar (Bronfenbrenner, 1979). Dalam kerangka ini, label seperti malas atau nakal perlu dikritisi karena dapat mengunci identitas konseli dan menutupi faktor penyebab. Contohnya, sering bolos dapat terkait dengan kecemasan sosial, perundungan, konflik rumah, atau iklim kelas yang tidak aman (Hattie, 2012)

2) Epistemologi: bagaimana pengetahuan BK diperoleh

Secara epistemologis, BK bersifat hibrida: ia menggabungkan pengetahuan empiris, interpretatif, dan praksis profesional. Pengetahuan empiris muncul dari penelitian, asesmen psikologis/pendidikan, dan evaluasi program (Erford, 2018). Pengetahuan interpretatif muncul dari dialog konseling yang menafsirkan pengalaman hidup konseli; di sini, makna bukan “data tambahan”, tetapi inti dari perubahan (White & Epston, 1990). Pengetahuan praksis lahir dari refleksi kasus, supervisi, dan kearifan profesional yang teruji dalam situasi nyata (IKI, 2011).

Implikasinya, validitas dalam BK tidak tunggal: selain validitas statistik, BK membutuhkan validitas kontekstual dan validitas etis, apakah intervensi masuk akal bagi konseli, aman, dan menghormati otonomi (Crotty, 1998; IKI, 2011)

3) Aksiologi: nilai dan tujuan konseling

Aksiologi menegaskan bahwa konseling tidak netral nilai. Tujuan BK mencakup kesejahteraan psikologis, perkembangan kemandirian, keberfungsian belajar-sosial, serta perlindungan dari perlakuan diskriminatif (Permendikbud RI, 2014). Dalam sekolah, ketegangan sering muncul ketika tujuan institusi (ketertiban, citra sekolah, target akademik) menarik layanan BK menjadi alat kontrol. Kode etik profesi menuntut konselor menempatkan kepentingan konseli dan prinsip nonmaleficence (tidak merugikan) sebagai prioritas, sambil tetap bertanggung jawab pada sistem (IKI, 2011). BK juga beririsan dengan nilai-nilai pendidikan: membentuk manusia yang bermartabat, berdaya, dan mampu hidup bersama secara adil. Dalam konteks Indonesia, aksiologi BK perlu memperhatikan keseimbangan antara otonomi individu dan relasi keluarga-komunitas; kemandirian dapat dimaknai sebagai kemampuan mengambil keputusan yang sehat tanpa memutus jaringan sosial yang suportif (Permendikbud RI, 2014).

4) BK sebagai ilmu sosial-humaniora dan sains terapan

BK sebagai ilmu sosial-humaniora menuntut kepekaan hermeneutik: memahami pengalaman, budaya, dan bahasa konseli. Namun, BK juga merupakan sains terapan yang wajib memastikan intervensinya aman dan efektif. Keduanya tidak perlu dipertentangkan. Justru, kedalaman pemahaman humaniora seharusnya memandu ketepatan tindakan terapan, sementara tuntutan terapan mencegah konseling menjadi percakapan tanpa arah (Corey, 2017).

c. Interkoneksi Psikologi, Pedagogi, dan Konseling

1) Bagaimana integrasi ketiganya memperkuat dasar keilmuan BK

BK pendidikan berdiri paling kokoh ketika ditopang tiga pilar yang saling mengunci. Pertama, psikologi memberi peta tentang perkembangan, emosi, motivasi, relasi sosial, serta dinamika keluarga, sehingga konselor memahami apa yang terjadi di dalam diri siswa (Santrock, 2018). Kedua, pedagogi memberi pemahaman tentang iklim kelas, strategi belajar-mengajar, diferensiasi, dan bagaimana praktik pembelajaran dapat menjadi protektif atau justru memicu stres (Hattie, 2012). Ketiga, konseling menyediakan relasi profesional, keterampilan komunikasi terapeutik, asesmen kebutuhan, desain intervensi, rujukan, serta etika profesi untuk mengubah pemahaman menjadi pertolongan yang aman (Corey, 2017; IKI, 2011). Integrasi ini membuat BK lebih holistik: konselor dapat menghubungkan dinamika intrapersonal siswa dengan tuntutan pembelajaran dan dukungan relasional yang diperlukan (Hattie, 2012; Santrock, 2018).

2) Risiko epistemologis jika salah satu bidang mendominasi

Jika salah satu pilar mendominasi, muncul reduksionisme sehingga intervensi mudah salah sasaran.

1. **Psikologisasi:** semua masalah dianggap intrapsikis. Dampaknya, faktor sistem (iklim sekolah, praktik disiplin, ketimpangan akses) diabaikan sehingga siswa dilabeli bermasalah padahal konteksnya yang perlu diperbaiki (Bronfenbrenner, 1979).
2. **Pedagogisasi:** problem emosi diperlakukan sebagai isu disiplin atau strategi belajar semata. Gejala trauma, depresi, atau kekerasan domestik dapat tersamarkan oleh solusi belajar lebih giat atau taat aturan, yang berisiko memperparah distress (Santrock, 2018).
3. **Teknisisme konseling:** konselor terjebak pada teknik dan administrasi, tetapi miskin pemahaman perkembangan dan konteks pembelajaran. Intervensi bisa tampak profesional namun tidak relevan, sehingga konseli merasa tidak dipahami dan putus relasi (Corey, 2017).

Karena itu, menggabungkan tiga bidang menjadi satu adalah kebutuhan yang sangat penting dalam ilmu pengetahuan dan etika, sehingga Bimbingan dan Konseling atau BK dapat menjawab tuntutan akuntabilitas sekaligus kemanusiaan (IKI, 2011; Permendikbud RI, 2014)

d. Dialektika Humanisme, Behaviorisme, dan Positivisme

Dalam Bimbingan dan Konseling, ada tiga pendekatan utama yang sering digunakan, yaitu Humanisme, Behaviorisme, dan Positivisme

1. Pertarungan paradigma dalam sejarah dan praktik konseling

Sejarah konseling memperlihatkan adanya tiga arus besar, yaitu humanisme, behaviorisme, dan positivisme. Humanisme menekankan martabat manusia, kebebasan memilih, dan relasi empatik. Hal ini dipandang sangat penting bagi perubahan dalam diri seseorang (Rogers, 1957).

Behaviorisme menekankan pembelajaran perilaku melalui konsekuensi dan penguatan. Fokusnya adalah perubahan yang dapat diamati, dan ini sangat berguna untuk meningkatkan keterampilan spesifik, seperti keterampilan sosial dan regulasi perilaku (Skinner, 1953). Dalam konteks sekolah, pendekatan perilaku sering disukai karena memberikan struktur dan indikator kemajuan yang jelas.

Positivisme adalah orientasi filosofis-metodologis yang menuntut prosedur sistematis, pengukuran, dan verifikasi. Dalam BK, positivisme muncul dalam tuntutan pelaporan, SOP, dan evaluasi program, sering kali untuk keperluan tata kelola sekolah dan akuntabilitas layanan publik (Permendikbud RI, 2014).

Ketegangan muncul ketika sekolah menuntut perubahan cepat, sementara konselor memerlukan ruang relasional dan sistem meminta bukti terukur. Tanpa integrasi, praktik konseling mudah jatuh pada ekstrem, seperti hanya berbincang-bincang tanpa arah atau melakukan interogasi demi disiplin.

2. Model sintesis konseptual yang relevan bagi Indonesia

Sintesis yang realistis untuk konteks pendidikan Indonesia dapat dirumuskan sebagai Model Integratif Humanistik–Behavioral Berbasis Bukti dan Berakar Budaya.

1. Relasi sebagai fondasi: konselor memulai dengan membangun rasa aman psikologis melalui empati, penerimaan, dan penghormatan pada martabat konseli (Rogers, 1957). Dalam budaya sekolah yang hierarkis, fondasi relasional ini mencegah konseling berubah menjadi instrumen kontrol.

2. Teknik terstruktur sebagai strategi pemberdayaan: setelah relasi aman terbentuk, konselor menggunakan teknik terarah untuk keterampilan yang disepakati bersama, seperti manajemen waktu atau latihan keterampilan sosial. Teknik diposisikan sebagai alat belajar, bukan alat “mengendalikan” siswa (Skinner, 1953).
3. Akuntabilitas proporsional: evaluasi digunakan untuk belajar dan memastikan keselamatan dan efektivitas layanan, bukan untuk memperlakukan atau mengkriminalisasi konseli. Dokumentasi dijaga kerahasiaannya, mengikuti asas kerahasiaan dan informed consent (IKI, 2011; Permendikbud RI, 2014).
4. Kontekstualisasi nilai dan jejaring dukungan: nilai lokal seperti gotong royong dan musyawarah dapat menjadi sumber daya intervensi, misalnya melalui dukungan teman sebaya dan kolaborasi orang tua, guru, dan konselor. Namun, konselor perlu reflektif karena nilai dapat menjadi protektif sekaligus sumber tekanan. Karena itu, konselor memfasilitasi dialog nilai yang sehat, bukan memaksakan satu standar (Permendikbud RI, 2014).

Dengan model ini, “perang paradigma” diubah menjadi kerja integratif: konselor memilih pendekatan berdasarkan kebutuhan konseli, konteks sekolah, dan pertimbangan etis.

e. Landasan Sosio-Kultural, Dekolonisasi Pengetahuan, dan Etika Profesi

1) Tantangan multikultural dan nilai lokal dalam praktik BK

Indonesia adalah ruang multikultural: perbedaan etnis, bahasa, agama, kelas sosial, serta urban–rural memengaruhi cara siswa memahami masalah dan mencari bantuan. Di banyak konteks, stigma kesehatan mental membuat siswa enggan mengakses layanan; di konteks lain, ekspresi emosi yang tidak langsung (misalnya melalui keluhan fisik atau diam) dapat disalahartikan sebagai “tidak kooperatif”. Karena itu, kompetensi multikultural bukan tambahan, tetapi inti kompetensi profesional (Sue et al., 1992).

Kompetensi multikultural menuntut konselor membangun kesadaran atas bias nilai, pengetahuan tentang keragaman budaya, serta keterampilan adaptasi intervensi agar tidak “memaksa” standar budaya dominan (Sue et al., 1992). Dimensi keadilan sosial memperluas fokus ke faktor struktural yang memarginalkan, termasuk di sekolah (Association, 2015).

2) Dekolonisasi pengetahuan: dari impor teori ke produksi pengetahuan kontekstual

Dekolonisasi pengetahuan dalam BK bukan berarti menolak teori global, melainkan menghindari impor konsep secara mentah tanpa membaca konteks. Dalam penelitian sosial, dekolonisasi mengingatkan bahwa pengetahuan selalu terkait relasi kuasa: siapa yang mendefinisikan “normal”, siapa yang diberi label “menyimpang”, dan siapa yang diuntungkan oleh suatu kategori (Smith, 1999). Dalam BK Indonesia, dua agenda praktis bisa ditekankan.

Pertama, kontekstualisasi teori. Misalnya, konsep “autonomi” dalam konseling Barat perlu diterjemahkan secara sensitif: banyak siswa Indonesia hidup dalam struktur relasional keluarga yang kuat. Autonomi dapat dimaknai sebagai kemampuan mengambil keputusan yang sehat dengan mempertimbangkan relasi, bukan sebagai pemutusan relasi (Permendikbud RI, 2014).

Kedua, produksi pengetahuan lokal. Konselor dan akademisi BK perlu memperkuat riset berbasis sekolah/komunitas: studi kasus, riset tindakan, pengembangan instrumen lokal, dan evaluasi program yang selaras dengan kebutuhan daerah (Repko, 2012). Ini sejalan dengan orientasi transdisipliner yang menempatkan aktor lokal sebagai bagian dari produksi pengetahuan, bukan sekadar “penerima teori”.

3) Dilema etika profesi yang sering muncul di Indonesia

Dalam praktik sekolah Indonesia, dilema etika yang sering muncul antara lain: (1) kerahasiaan vs tuntutan informasi dari sekolah/orang tua; (2) informed consent pada isu sensitif (kekerasan, orientasi seksual, ide bunuh diri) ketika siswa masih berada dalam relasi kuasa sekolah–keluarga; (3) tekanan agar konselor menjadi alat penertiban; (4) penanganan kasus berat tanpa supervisi dan jejaring rujukan; serta (5) risiko privasi pada layanan digital (chat, penyimpanan data, penyebaran informasi kasus di grup) (IKI, 2011; Permendikbud RI, 2014).

Kode etik menegaskan bahwa data konseli bersifat rahasia dan hanya boleh diungkap dengan dasar yang jelas (misalnya persetujuan konseli atau pertimbangan keselamatan), disertai dokumentasi yang memadai (IKI, 2011).

4) Pendekatan etika reflektif sebagai praktik profesional

Dalam situasi dunia nyata, aturan tidak selalu memberi jawaban otomatis. Karena itu, pendekatan etika reflektif relevan: konselor menimbang konteks, risiko, nilai yang bertabrakan, serta dampak keputusan terhadap kesejahteraan konseli dan pihak lain (IKI, 2011). Langkah kerja yang dapat dipakai ialah: (1) mendefinisikan dilema secara spesifik; (2) memetakan pemangku kepentingan, relasi kuasa, dan risiko; (3) merujuk kode etik, regulasi, dan SOP sekolah; (4) berkonsultasi/bersupervisi dengan sejawat; (5) memilih opsi yang paling melindungi keselamatan dan martabat konseli; serta (6) mendokumentasikan alasan keputusan dengan aman.

Etika reflektif juga selaras dengan paradigma post-disipliner: konselor tidak hanya menjalankan “prosedur”, tetapi juga memahami bahwa keputusan etis selalu berada dalam jaringan sosial-budaya dan sistem pendidikan. Dengan demikian, profesionalitas BK ditopang oleh kompetensi ilmiah, sensitivitas budaya, dan keberanian etis.

KESIMPULAN

Pembahasan ini menegaskan bahwa keilmuan bimbingan dan konseling (BK) akan rapuh jika hanya bertumpu pada satu paradigma atau satu disiplin. Paradigma modern penting dalam menjamin akuntabilitas melalui asesmen terarah, intervensi berbasis bukti, dan evaluasi hasil, sementara paradigma postmodern menekankan kepekaan terhadap makna, identitas, bahasa, serta relasi kuasa dalam pengalaman konseli. Di sisi lain, paradigma transdisipliner memperluas fokus BK dari individu menuju perubahan ekosistem melalui kolaborasi lintas aktor dan pembentukan lingkungan yang suportif. Dalam konteks ini, cara berpikir post-disipliner menjadi jembatan yang memungkinkan integrasi ketiganya secara fleksibel dan bertanggung jawab. Dari perspektif filsafat ilmu, BK memerlukan pijakan ontologis, epistemologis, dan aksiologis yang kuat, serta integrasi psikologi, pedagogi, dan konseling untuk mencegah reduksionisme dan menghasilkan praktik yang lebih holistik dan kontekstual.

Berdasarkan hal tersebut, pengembangan keilmuan BK di era post-disipliner perlu diarahkan pada penguatan kurikulum pendidikan konselor yang integratif, pengembangan riset berbasis sekolah dan komunitas, serta pembangunan jejaring kolaboratif lintas profesi agar layanan menjadi lebih preventif dan responsif. Selain itu, penguatan etika reflektif melalui supervisi, standar operasional, dan perlindungan data menjadi aspek penting dalam menjaga kualitas praktik profesional. Kerangka ini memberikan kontribusi penting bagi

pengembangan penelitian, pendidikan, dan praktik BK yang lebih efektif, manusiawi, serta selaras dengan kebutuhan dan realitas masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Association, A. C. (2015). *Multicultural and Social Justice Counseling Competencies*. American Counseling Association. <https://www.counseling.org/docs/defaultsource/competencies/multicultural-and-social-justice-counseling-competencies.pdf>
- Bronfenbrenner, U. (1979). *The Ecology of Human Development: Experiments by Nature and Design*. Harvard University Press.
- Corey, G. (2017). *Theory and practice of counseling and psychotherapy* (10th ed.). Cengage Learning.
- Crotty, M. (1998). *The foundations of social research: Meaning and perspective in the research process*. SAGE.
- De Shazer, S. (1991). *Putting differences to work*. W. W. Norton.
- Erford, B. T. (2018). *Orientation to the counseling profession: Advocacy, ethics, and essential professional foundations* (4th ed.). Pearson.
- Hattie, J. (2012). *Visible learning for teachers: Maximizing impact on learning*. Routledge.
- Ikatan Konselor Indonesia. (2011). *Kode etik profesi konselor Indonesia*. <https://pdfcoffee.com/kode-etik-konselor-indonesia-pdf-free.html>
- Journal of Consulting Psychology*, 21(2), 95–103. <https://psycnet.apa.org/record/1958-00646-001>
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Bimbingan dan*
- Konseling pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah*. <https://peraturan.go.id/files/bn1544-2014.pdf>
- Neukrug, E. (2017). *Theory, practice, and trends in human services: An introduction* (6th ed.). Cengage Learning.
- Niculescu, B. (2002). *Manifesto of transdisciplinarity* (K. Voss, Trans.). State University of New York Press.
- Niculescu, B. (2010). *Methodology of transdisciplinarity: Levels of reality, logic of the included middle, and complexity*. *Transdisciplinary Journal of Engineering & Science*, 1, 19–38. <https://pdfs.semanticscholar.org/afc3/2333d4011c6e872f9c7a520b328dc08a7b06.pdf>
- Pratiwi, A. R., & Hidayat, R. (2021). *Challenges of school counselors in Indonesia: A qualitative study*. *Jurnal Bimbingan Konseling*, 10(1), 45-58.
- Repko, A. F. (2012). *Interdisciplinary research: Process and theory* (2nd ed.). SAGE.
- Rogers, C. R. (1957). *The necessary and sufficient conditions of therapeutic personality change*.
- Santrock, J. W. (2018). *Educational psychology* (6th ed.). McGraw-Hill Education.
- Sari, N. P. (2020). *Professionalism of School Counselors in the Indonesian Context: Issues and Challenges*. *International Journal of Education and Counseling*, 2(2), 99-110
- Skinner, B. F. (1953). *Science and human behavior*. Macmillan. http://fitelson.s464.sureserver.com/prosem/skinner_1.pdf

- Smith, L. T. (1999). *Decolonizing Methodologies: Research with Indigenous Peoples*. Zed Books.
- Sue, D. W., Arredondo, P., & McDavis, R. J. (1992). Multicultural counseling competencies and standards: A call to the profession. *Journal of Counseling & Development*, 70(4), 477–486. <https://doi.org/10.1002/j.1556-6676.1992.tb01642.x>
- Walsh, F. (2006). *Strengthening family resilience* (2nd ed.). Guilford Press
- White, M., & Epston, D. (1990). *Narrative means to therapeutic ends*. W. W. Norton.